

Reorientasi Pendidikan Agama Pada Era Multikultural dan Multireligius^{*)}

Oleh H.M. Amin Abdullah

Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kehidupan sosial-keagamaan di era modern sekarang ini ditandai oleh semakin seringnya pertentangan dan bentrok kultural, sosial, etnis, dan agama yang melibatkan masyarakat sipil seperti yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso dan militer seperti yang terjadi di Israel, Chechnya, Kashmir, Irlandia dan Iraq saat ini. Hal ini menambah alasan betapa pentingnya, lebih dari tahun-tahun sebelumnya, untuk menambah, mengembangkan dan memperkaya intensitas saling tukar pengetahuan yang dapat dipercaya tentang berbagai agama (aspek *doktrin*) dan kehidupan sosial-keagamaan (aspek *empiris-historis*).

Berkaitan dengan itu, seringkali diskusi-diskusi publik di media massa dan di antara para politisi dan tokoh organisasi sosial-keagamaan, begitu juga perbincangan sehari-hari yang didasarkan atas pengetahuan atau gambaran yang terlampau menyederhanakan persoalan sosial-keagamaan dan bahkan menyesatkan. Lebih-lebih lagi, di antara para akademisi dan peneliti yang terlibat langsung dalam pengajaran (*teaching*) dan peneliti (*research*) tentang agama-agama yang hidup berkembang di dunia saat

ini, yang tidak sadar akan pentingnya karya dan perhatian orang lain di luar diri kita sendiri.

Diskusi tentang agama-agama di tanah air, terkesan lebih didominasi oleh model-model pendekatan teologi atau kalam dalam dunia pemikiran Islam. Padahal menurut Charles J. Adams (1976), Richard C. Martin (1985) dan Mohammad Arkoun (2002), pendekatan studi agama hingga sekarang setidaknya telah melewati 4 perkembangan. Ini sejak dari model pendekatan *normatif-religius* yang menekankan model pendekatan *dogmatis-polemik-agresif*, berkembang ke *epitologis-historis*, yang menitikberatkan studi naskah-naskah keagamaan, kemudian berkembang lagi dengan memanfaatkan jasa *ilmu-ilmu sosial*. Terakhir berkembang ke arah *fenomenologi agama* yang mengetengahkan cara pandang baru dan sikap yang lebih adil, transparan atau terbuka dalam melihat realitas objektif keanekaragaman agama umat manusia.

Oleh karenanya, membangun corak teologi inklusif-pluralistik, baik yang diajukan oleh kelompok Muslim maupun Kristen atau oleh kelompok

^{*)} Tulisan ini telah dipresentasikan pada seminar "Rethinking Islam UII" yang diadakan Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (PSI-UII) bekerjasama dengan The Asia Foundation tanggal 30 September 2003

agama lain yang manapun, sangat sulit dimengerti dan dipahami apalagi dipraktikkan oleh umat manusia dalam kehidupan sehari-hari, jika saja sejarah perkembangan dan model-model pendekatan yang digunakan studi agama-agama di lingkungan komunitas umat beragama sendiri tidak pernah diperkenalkan. Tanpa diperkenalkan pola pikir dan model-model yang biasa digunakan umat beragama dalam memahami kompleksitas agama sendiri dan lebih-lebih agama orang lain adalah merupakan lompatan yang terlalu jauh, jika seseorang langsung memasuki fase teologi atau kalam/aqidah yang bersifat "inklusif-pluralistik".

Pendekatan dan pemahaman terhadap agama-agama memang memerlukan pendekatan yang "khas". Diperlukan sebuah pendekatan dan pemahaman yang dapat berlaku adil-terbuka-transparan terhadap realitas hidup beragama pada umumnya. Pendekatan baru ini tidak boleh secara tergesa-gesa menepikan apalagi menyingkirkan keberadaan pengikut agama-agama yang secara faktual memang hidup dalam masyarakat majemuk, tetapi tidak juga boleh berpendapat dan memandang bahwa seluruh agama yang ada itu sama saja. Setiap agama yang ada secara histories-empiris adalah "unik", tidak bisa disamakan dengan begitu saja antara satu dan lainnya. Namun di balik ketidaksamaan yang nyata tersebut, juga terkandung nilai-nilai dasar fundamental yang sama, yang hanya dapat dipahami secara "intelektual" dan "spiritual", dan bukannya secara "emosional" dan "institusional".

Dari catatan tersebut, mungkin ada manfaatnya jika dibedakan terlebih dahulu meskipun tidak dapat dipisahkan antara tiga konsep berikut : keberagamaan manusia (*religiosity*), keanekaragaman agama (*religions*) dan proses "menjadi" ke arah yang lebih baik-sempurna-lengkap, yang tidak kenal henti, dan terus menerus berlangsung selama hayat dikandung badan (*being religious*). Di antara ketiga konsep tersebut ada pertanyaan susulan yang perlu dijawab : mana di antara ketiga wilayah keagamaan tersebut yang dianggap "absolute" (mutlak), mana yang dianggap "relative" (nisbi) dan mana pula yang bersifat "*relatively absolute*" (secara relatif absolut). Dalam kehidupan sehari-hari seringkali ketiga hal tersebut dicampur-aduk sehingga menyulitkan umat beragama dalam menghadapi persoalan pelik sosial-keagamaan di masyarakat, dan tidak jarang percampur-adukan itu justru mendorong ke arah percekocokan, perselisihan dan benturan antarumat beragama.

Setiap orang; keluarga, kelompok dan juga masyarakat, merindukan untuk mengenal dengan sungguh-sungguh dan mendambakan tanpa syarat adanya ide dasar ketuhanan, kebaikan, kesejahteraan, kesehatan, kedamaian, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, ketenangan, spiritualitas, integritas, kejujuran, ketertiban, keselamatan, keindahan. Tuntutan dan kebutuhan dasar umat manusia ini bersifat absolut atau mutlak, karena setiap manusia, tanpa pandang perbedaan warna kulit, etnisitas, ras dan agama, mendambakan dan mencita-citakan hal yang sama.

Kebutuhan mendasar ini dituntut oleh umat manusia tanpa syarat apapun. Sebagai contoh, ide kebaikan atau keadilan, dituntut, dicita-citakan, didambakan dan diimpi-impikan oleh semua lapisan masyarakat beragama, baik masyarakat Muslim, Yahudi, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, maupun masyarakat pengikut agama lainnya. Bahkan juga oleh kelompok masyarakat atau individual yang tidak mau berafiliasi dengan kelompok agama yang manapun. Begitu juga "religiusitas". Religiusitas adalah sejenis tuntutan pemenuhan hal-hal yang bersifat pokok, fundamental, spiritual, dan mendasar, yang diperlukan oleh setiap umat manusia tanpa pandang latar belakang etnisitas, asal negara maupun komunalitas keberagamaannya. Itulah makna absolut yang dimaksud dalam tulisan ini.

Hanya saja, perlu segera dicatat di sini bahwa ketika hal-hal yang dianggap "absolute" ini turun ke bawah, ke wilayah kesejarahan manusia dan sosial kemasyarakatan yang bersifat historis-empiris-kultural, maka terjadilah berbagai model, corak, cara, pilihan strategi dan taktik untuk mencapainya. Setiap kelompok masyarakat, budaya dan agama mempunyai cara yang berbeda-beda dalam merumuskan, mengkonseptualisasikan, menginterpretasikan apalagi menentukan cara-cara untuk mencapainya. Termasuk di sini konsep-konsep kepercayaan, agama, spiritualitas yang dirumuskan secara historis-empiris, seperti yang termanifestasikan dalam Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Katolik, Islam dan begitu seterusnya.

Dalam hal praktis, masing-masing kelompok ras, etnis, golongan, budaya dan agama berlomba dengan caranya sendiri-sendiri untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan yang dianggap pokok, mendasar dan absolut tersebut. Perbedaan konsep, bahasa yang digunakan, kultur, luas- sempitnya pengetahuan, cara dan strategi untuk mencapainya inilah yang menjadikan sebagian anggota masyarakat kemudian bertikai untuk memperebutkan yang "terasi", "terbaik", "tertunggul", "tersempurna", "paling dapat menyelesaikan persoalan" dan begitu seterusnya. Tanpa sadar, manusia telah memasuki wilayah pertarungan dan kompetisi yang bersifat sosiologis. Hukum-hukum sosial mulai berlaku di sini. Untuk menambah kewibawaan ajaran di depan umat pengikutnya, maka pengutipan dan penyitiran teks wahyu harus dilakukan di sana-sini tanpa mempedulikan konteks. Oleh karenanya, pada dataran ini, semua yang tadinya dianggap absolut tersebut tiba-tiba berubah menjadi "relatif".

Relatif di sini, bukan berarti nihilistik, tetapi semata-mata karena adanya perbedaan-perbedaan interpretasi dan pemaknaan antara pengikut golongan agama yang satu dan golongan agama yang lain. Relativitas di sini wajar adanya karena tingkat perbedaan pengalaman sejarah yang dijalani oleh suku, raja, umat, bangsa, *kawula cilik*, golongan elit, tingkat pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat (nomad, agraris, industri, informasi-komunikasi) dan alat-alat teknologi yang dimiliki. Belum lagi, bicara tingkat jaringan kerja (*networking*) yang dimiliki dan

intensitas kontak dan pertemuan dengan golongan atau kelompok lain.

Dengan begitu kita baru dapat memahami makna pluralitas agama, dengan akibat relativitas yang turut melekat di dalamnya. Namun, relativitas di sini sama sekali tidak mengandung maksud untuk menafikan, apalagi sampai menegaskan tujuan-tujuan luhur yang secara "absolut" diajarkan, dimiliki dan dipegang teguh oleh pengikut agama-agama. Sisi yang cukup jelas, ketika cita-cita luhur, *belief*, *credo*, iman, *aqidah* yang semula dianggap "absolut" tersebut, dikonseptualisasikan dan diungkapkan lewat bahasa manusia dan diinstitutionalisasi lewat lembaga, perkumpulan dan organisasi-organisasi sosial, budaya dan agama. Kadangkala, kepentingan politik ikut terlibat dan bermain di dalamnya dan bahkan memasuki wilayah yang bersifat historis-kultural dan "relatif".

Dengan begitu, maka hal-hal yang bersifat "relatif" (*instrumental values*) sesungguhnya tidak dapat dengan begitu saja dipindah ke wilayah yang bersifat "absolut" (*ultimate values*). Jika hal-hal yang sesungguhnya relatif ini diabsolutkan atau disakralkan, maka cepat atau lambat akan terjadi disharmoni sosial (ketidaknyamanan, ketakutan, keterkekangan, kekakuan, keterpaksaan, ketidakbebasan, perasaan tertindas), yang pada saatnya, akan menimbulkan kekerasan (*violence*) baik secara fisik maupun psikologis dalam kehidupan sosial-keagamaan.

Sampai di sini dapat dimaklumi, jika dalam kehidupan sosial-keagamaan sehari-hari seringkali terjadi percampuradukkan antara

wilayah yang biasa disebut-sebut sebagai "absolut" dan "relatif". Secara tidak sadar para pemeluk agama dan lebih-lebih para pemimpin dan pemukanya mengatakan bahwa yang relatif-partikular itulah yang sesungguhnya absolut-universal, semata-mata hanya untuk keperluan menegaskan, mengokohkan dan memperteguh identitas diri dan kelompoknya di hadapan berbagai rival kelompok sosial-keagamaan lainnya. Dalam situasi seperti ini, mungkinkah teologi yang bersifat inklusif-pluralistik diperkenalkan, dikembangkan dan dihidupsuburkan?

Persoalan ini akan tergantung pada model, metode dan pendekatan *pendidikan agama* yang biasa digunakan di lingkungan seminari, pesantren, sekolah (dari SD sampai dengan SMU) yang didirikan oleh yayasan yang berbasis keagamaan. Ini termasuk sekolah-sekolah tinggi dan perguruan tinggi agama seperti perguruan tinggi umum yang didirikan oleh komunitas, yayasan, badan hukum yang berafiliasi baik kepada Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Budha. Kalau model pendekatan dan strategi pembelajaran dan *pendidikan agama* di sekolah (dari TK sampai Perguruan Tinggi) hanya *sekadar* memindahkan dan mengulang kembali materi, metode dan pendekatan yang biasa digunakan dalam komunitas intern sendiri, baik di gereja-gereja, masjid-masjid, vihara, atau sinagog, maka institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi tidak lagi dapat diandalkan sebagai media pencerdas dan pencerah kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama dalam era multikultural. Bagaimana materi,

metode dan pendekatan serta model dan pola *pendidikan agama* yang diharapkan dapat mencerdaskan para pemeluknya, supaya tidak mudah terjatuh dalam konfessionalitas dan komunalitas yang sempit, merupakan sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab.

Sebelum merespons pertanyaan yang rumit tersebut, konsep terakhir dari rangkaian triangulasi di atas, perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, yaitu "proses terus-terus, tak kenal final dalam upaya untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan, keadilan, kesempurnaan, ketuhanan selama hayat masih dikandung badan (*On Going Process of Being Religious*).

Ketegangan hubungan yang bersifat perennial antara yang "absolut" dan yang "relatif" dalam pemikiran sosial-keagamaan hanya dapat dikurangi ketika manusia menyadari kembali bahwa ia hanyalah makhluk yang sedang berproses secara terus menerus. Ketika proses tersebut berlangsung, tidak ada yang dapat disebut "absolut" dalam arti yang sebenar-benarnya dan juga tidak ada yang disebut "relatif" dalam arti yang sebenar-benarnya. Ketika proses itu sedang berlangsung, banyak hal dapat saja terjadi.

Sangat mungkin, yang dulunya ketika masih muda, ketika masih dalam mencari bentuk, ketika masih menjadi tokoh aktivis keagamaan sangat dikenal sebagai tokoh yang idealistik-fundamentalistik, dapat saja berubah mendadak menjadi sangat pragmatis-opportunistik ketika telah mendapat kesempatan duduk menjadi tokoh LSM, tokoh partai, atau pejabat pemerintah, atau figuran yang

membantu pejabat pemerintah yang sedang berkuasa. Atau yang dulunya biasa-biasa saja, dapat pula berubah menjadi tokoh fundamentalistik-idealistik-rigid yang tidak mengenal sama sekali arti kompromi dan konsensus dalam kehidupan sosial bersama.

Situasi dan perubahan politik sesaat, keterjepitan dan ketercukupan ekonomi, mobilitas vertikal yang dialami oleh seseorang dan kelompok, pergaulan di lingkungan struktur sosial yang homogen atau heterogen, model pendidikan dan training keagamaan yang diperoleh, luas-sempitnya tingkat pergaulan baik lokal, regional, nasional maupun internasional, ikut berperan dalam menentukan "*on going process of being religious*" tersebut.

Pendekatan *penomenologi agama* dapat membantu mencari jawaban atas kesulitan atau ketegangan (*tension*) antara absolutitas dan relativitas dalam beragama. Pendekatan penomenologi agama memang ingin mendialogkan, menyatukan, dan menghimpun kembali kedua entitas berpikir yang seringkali telah terpisah secara diametrical. Penomenologi agama dapat membantu memahami kedua model berpikir keagamaan, baik yang berdimensi absolut-normatif maupun yang relatif-historis, namun berupaya dengan berbagai cara untuk mempertemukan keduanya kembali dalam satu tarikan nafas sosial-keagamaan.

Dimensi historisitas-relativitas dari agama-agama tidak bias dihindari sama sekali. Perwujudan konkret secara empiris-historis-psikologis yang termanifestasikan dalam

institusi-institusi keagamaan dan berbagai perangai individu maupun kelompok umat manusia adalah bersifat relatif. Agama-agama menjadi unik dan diverse-beranekaragam sekaligus. Tidak bisa disamakan apalagi disatukan antara yang satu dan lainnya. Keunikan itulah yang merupakan perwujudan sosiologis-antropologis dari agama-agama.

Pendekatan perbandingan agama (*comparative study of religions*) in the old fashion menjadi sedikit kurang memuaskan di sini. Karena logika perbandingan dalam dunia pemikiran agama tertentu biasanya mengatakan bahwa $A + B + C = A$. Setelah melakukan perbandingan, ternyata agama yang dipeluknya sajalah yang paling baik dan benar, sedang yang lain kurang baik, tidak benar alias palsu dan tidak perlu dihargai. Ungkapan bahwa "agama yang dipeluknya sajalah yang paling baik dan paling benar" dapat dimaklumi, tetapi "memandang bahwa agama lain tidak baik, tidak benar dan pemeluknya tidak perlu dihargai" adalah ungkapan atau pernyataan yang sangat problematik dalam kacamata kehidupan sosial-keagamaan masyarakat majemuk, kritis seperti sekarang ini.

Pendidikan agama era multikultural dan multireligius yang diasumsikan menggunakan logika $A+B+C+D = A+B+C+D$ lebih baik daripada logika perbandingan model lama. Dengan logika demikian, masing-masing pemeluk agama akan merasa tenteram dan aman dari cemooh dan ejekan orang yang tidak seagama, serta mempunyai kedudukan yang sama-sama terhormat. Lain lagi model pengajaran

teologi atau kalam yang hanya mengajarkan $A+A+A = A+A+A$. Biasanya, lama sekali seseorang atau kelompok mempelajari agama, tetapi tingkat pengetahuannya hanya terbatas pada agama yang dipeluknya sendiri. Selama sekian lama belajar, tidak pernah menyentuh dan bersinggungan sama sekali dengan pemeluk agama yang dimiliki oleh tetangga yang tinggal di sebelah rumah, tetangga RT atau RW, di seberang desa, di negara tetangga. Di sini rasanya filosofi pendidikan agama era multireligius dan era multikultural seperti di tanah air perlu terus menerus dipikir dan dirumuskan oleh berbagai pihak yang berkompeten.

Penomenologi agama sangat memperhatikan dimensi relativitas, historisitas atau empirisitas dari agama-agama dalam era multikultural ini. Namun bukanlah pendekatan penomenologi agama, jika ia hanya memperhatikan aspek relativitas-empiris-historisitas dari agama-agama. Ia juga sangat dan sungguh-sungguh memperhatikan dan peduli terhadap dimensi normativitas-absolusitas agama-agama.

Dimensi absolusitas yang juga sangat diperhatikan oleh penomenologi agama adalah sisi "*what lies beyond the diverse phenomenon of religions*" (apa yang sesungguhnya ada dan bersifat fundamental-mendasar di balik fenomena keanekaragaman agama-agama umat manusia). Pencarian ini cukup berat karena melibatkan logika, intelek, spiritualitas, kecerdasan bahkan nalar kritis selain ketulusan dan keikhlasan. Untuk memasuki wilayah ini, pendekatan penomenologi agama mengedepankan model

pendekatan yang terbuka-transparan-empati terhadap realitas keaneka-ragaman atau pluralitas agama.

Pola-pola umum (*general pattern*) yang sangat mendasar, fundamental dan menentukan, yang berada di balik pola-pola khusus (*particular pattern*) agama-agama selalu menjadi titik perhatiannya. Pola-pola dasar, umum dan fundamental tersebut hanya dapat dipahami lewat logika kritis, yang terbuka-transparan. Pola-pola dasar, umum dan fundamental inilah sesungguhnya yang bersifat absolut, *unconditioned*, tidak bersyarat, dan tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun. Agama-agama hanya bisa bertemu pada wilayah *general pattern* (pola umum) yang bersifat fundamental-absolut, setelah melewati proses penjernihan lewat bantuan akal kritis dan ketulusan hati. Hanya akal kritis dan ketulusan hati serta kedalaman spiritualitas saja yang dapat menembus dan melewati tapal batas historisitas-relativitas agama-agama pada wilayah sosiologis-antropologis.

Teologi, kalam atau pemikiran keagamaan yang bercorak inklusif-pluralistik adalah *pola pikir* keagamaan "baru" era multikultural-multireligius yang hanya dapat dibangun lewat pendekatan penomenologi agama dengan cara selalu mempertimbangkan, mendekatkan, mendialogkan, mengkomunikasikan, dan menyatupadukan dimensi absolutitas dan relativitas dalam satu keutuhan pola pikir dan satu tarikan nafas kehidupan sosial-keagamaan. Dengan cara begitu, eksistensi umat pemeluk agama-agama sebagai entitas sosiologis-antropologis dapat dihargai keberadaannya (pluralistic). Namun tetap dan selalu waspada akan

kemungkinan adanya bahaya komunalitas dan konfessionalitas sempit yang bersifat relatif, yang selalu mengintip di belakang pola pikir keagamaan yang lebih suka menonjolkan arti penting identitas.

Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk meredamnya yaitu dengan mengingatkan kembali secara terus-menerus adanya sisi lain dari keberagaman yang relatif tersebut. Adanya pola-pola umum, mendasar dan fundamental dalam keberagaman umat manusia yang bersifat absolut yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak bersyarat, yang dapat digunakan untuk mendekatkan kembali berbagai kelompok sosial-keagamaan (inklusif) yang saling berjuang mempertahankan dan memperkuat identitas pribadi, keluarga dan kelompoknya.

Dengan mempertimbangkan dan menyatukan kembali kedua sisi ini dalam satu tarikan nafas sosial-keagamaan, diharapkan akan muncul pola pikir keagamaan "baru" yang bersifat relatif absolut (*relatively absolute*). Dikatakan "relatif", karena realitas keberagaman di atas planet ini adalah memang plural. Sedang penyebutan "absolut" dikandung makna bahwa di balik realitas keberagaman yang plural tersebut tertanam jangkar moral, panduan etik, nilai-nilai luhur, nilai-nilai fundamental, dan pola-pola nilai dasar keagamaan yang menuntut pengikutnya untuk meraih dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari tanpa syarat apapun. Pola pikir keagamaan "baru" yang lebih menuntut otentisitas, genuinitas, orisinalitas, kematangan iman, ketulusan dan kejernihan berpikir inilah yang ingin dikatakan sebagai teologi atau kalam "baru"

yang bersifat inklusif-pluralistik.

Seseorang dan lebih-lebih pimpinan kelompok atau organisasi sosial-keagamaan era multikultural-multireligius dituntut untuk dapat menyadari sepenuhnya hubungan sirkular-melingkar antara ketiga konsep terurai di atas, di tengah-tengah kegigihan perjuangan dan jihad sosial-keagamaan mereka. Kesadaran dan panduan etik tersebut diperlukan supaya seseorang atau kelompok tidak dengan mudah dapat terjebak pada belenggu kekerasan absolutitas dan kegamangan relativitas.

Bangunan teologi atau kalam yang bersifat inklusif-pluralistik yang mudah diungkapkan dan menjadi obsesi bagi sebagian kelompok pembaharu pemikiran teologi, baik dalam lingkungan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Yahudi maupun lainnya. Ini hanya dapat dipahami dan dipraktikkan jika dapat menyentuh, menyatukan dan mendoalogkan ketiga konsep tersebut secara simultan dalam satu tarikan nafas ruh dan semangat keberagamaan yang segar, yaitu *religiosity, religions, dan on going process of being religious.****